

**LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK  
PPID PROVINSI JAWA TIMUR**

**RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK SAMPAI DENGAN BULAN JULI TAHUN 2018**

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	Endhik Imam Sunarto	13 hari			v	- Kebertaan - Dianjurkan untuk mengirim permohonan informasi ke PPID bersangkutan
2.	Legimin	9 hari			v	dianjurkan melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai peraturan
3.	Panca Wibawaji	13 hari		v		- Kebertaan - Dianjurkan untuk mengirim permohonan informasi ke PPID bersangkutan - PPID Prov. Jatim mengirim surat ke Bappeda untuk permintaan data dimaksud
4.	Malang Corruption Watch (MCW)	5 hari		v		PPID Prov. Jatim mengirim surat ke Dinas ESDM untuk permintaan data dimaksud
5.	Jumiati	1 hari	v			Sudah mendapatkan jawaban permohonan informasi (sertifikat) dari BPN
6.	Elisa Fitria	20 hari			v	dianjurkan melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai peraturan
7.	Imelda Fatmawati	1 hari		v		Ditindaklanjuti dengan menelepon pemohon informasi dan disarankan untuk menghubungi kab/kota di Jawa Timur
8.	Adi Kurniawan	3 hari	v			Sudah mendapatkan jawaban informasi dari PT Indosat Ooredoo
9.	Andika Kurnia Nanda	1 hari			v	Dianjurkan melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai peraturan
10	Ulva Novita Sari	10 hari			v	Dianjurkan melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai peraturan
<b>Jumlah sementara</b>			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10 Permohonan</b>

Tahun 2018							
NO.	TANGGAL PERMOHONAN	NAMA	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	TUJUAN	KEPUTUSAN/JAWABAN	TANGGAL JAWABAN
1.	5 Januari 2018	Endhik Imam Sunarto (melalui website PPID )	Wiraswasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta struktur ruang dan pola ruang RT/RW Provinsi JAwa Timur (dengan resolusi besar/tinggi)</li> <li>2. Perda Kota Blitar nomor 12 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Blitar, lampiran dan naskah akademik</li> <li>3. Perda Kota Blitar nomor 9 tahun 2001 tentang RT/RW Kota Blitar, lampiran dan naskah akademik</li> <li>4. Perda Kota Blitar nomor 10 tahun 2017 tentang RDTR dan peraturan Zonasi lampiran dan naskah akademik</li> </ol>	Untuk mengetahui RT/RW dan RDTR/Zonasi	Tidak dijawab	
	23 Januari 2018	Endhik Imam Sunarto (melalui email PPID)	Wiraswasta	Keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi.	keberatan	Dijawab melalui surat nomor 065/431/114.2/2018	24 Januari 2018
2.	11 Januari 2018	Legimin (melalui website PPID)	Wiraswasta	Bukti aset tanah bekas penampungan dusun Badek dan dusun Gatok Desa Sepawon Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri oleh PTPN XII Perkebunana Ngrangkah Pawon.	Untuk bukti kepemilikan asset dan penyelesaian permohonan hak atas tanah bekas penampungan Desa Sepawon Kec. Ploso Klaten Kab. Kediri.	Dijawab melalui surat nomor 065/430/114.2/2018	24 Januari 2018

3.	13 Januari 2018	Panca Wibawaji (melalui email ppidprov@jatimprov.go.id)	Wiraswasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Jatim tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZW P3K)</li> <li>2. Naskah Akademik dari Perda RT RW Jatim dan Peraturan zonasi</li> <li>3. Informasi mengenai Badan Koordinasi Pembangunan Regional Daerah Provinsi, alamat kantor, nama pegawai, tata kerja dan DPA 2015-2018, RKA, LAKIP 2015-2017</li> <li>4. Alamat Kantor dan nama pegawai penyidik Pegawai negeri Sipil di tingkat provinsi</li> </ol>	Untuk mengetahui rencana zonasi, naskah akademik, dan BKPRD	Dijawab melalui surat nomor 065/329/114.2/2018	18 Januari 2018
	30 Januari 2018	Panca Wibawaji	Wiraswasta	Keberatan atas tidak dipenuhinya permohonan informasi dengana lasan belum dikuasai/ didokumewntasikan, dan meminta kami untuk mengajukan permohonan sendiri kepada PPID pembantu terkait (Bappeda/Biro Hukum)	keberatan	Dijawab melalui surat kepada Kepala Bappeda Prov. Jatim, Kepala Biro Hukum Setda prov. Jatim, kepala Dinas Satpol PP nomor 065/565/114.2/2018	31 Januari 2018
4.	5 februari 2018	Malang Corruption Watch (MCW) Surat nomor : 14/K/BP-MCW-II/2018	LSM	<p>Dokumen Daftar Perizinan pertambangan di Jawa Timur yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis pertambangan</li> <li>- lokasi (kecamatan, desa, dusun)</li> <li>- Tahun berlakunya ijin</li> <li>- Pemegang ijin (Badan</li> </ul>	Sebagai media kajian internal dan media edukasi kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dijawab melalui surat nomor 065/784/114.2/2018 ke pemohon informasi</li> <li>2. Surat kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur nomor 065/1206/114.2/2018</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 12 februari 2018</li> <li>2. 7 Maret 2018</li> </ol>

				Usaha, dll) - Nomor ijin			
5.	9 Februari 2018	Jumiati	Perseorangan	Perihal pengurusan sertifikat tanah di kantor pertanahan kab. Sidoarjo	Agar sertifikat tanah segera selesai dan ada kepastian yg jelas kapan selesainya	Dijawab melalui surat nomor 065/783/114.2/2018	12 Februari 2018
6.	28 Februari 2018	Badan Pekerja Malang <i>Corruption Watch</i> (MCW)	LSM	Dokumen Daftar Perizinan Pertambangan di Jawa Timur, yang meliputi jenis pertambangan, lokasi (Kota/Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dusun), Tahun berlakunya izin, Pemegang izin (badan usaha), dan Nomor izin.	Dipergunakan sebagai media kajian internal <i>Malang Corruption Watch</i> (MCW).	Dijawab melalui surat Nomor 065/1206/114.2/2018	7 Maret 2018
7.	12 Februari 2018	Elisa Fitria	Mahasiswa	Laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2015/2016/2017 kab/kota se Jawa Timur oleh kemenpan RB	Untuk penelitian skripsi	Dijawab melalui surat Nomor : 065/1308/114.2/2018 dengan melengkapi persyaratan dan mengisi form permohonan informasi yang disiapkan PPID tujuan.	13 Maret 2018
8.	2 April 2018	Imelda Fatmawati	Mahasiswa	Data kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public di tiap daerah seJawa Timur 2017	Untuk penelitian skripsi	Ditindaklanjuti dengan menelepon pemohon informasi dan disarankan untuk menghubungi kab/kota di Jawa Timur	3 April 2018
9.	4 April 2018	Adi Kurniawan	PNS	1. Perihal meminta untuk mencabut pendaftaran nomor 085745545096 dengan identitas dari ayah Adi Kurniawan 2. Pengecekan nomor-nomor yg telah teregistrasi lintas provider, karena	Mencabut pendaftaran nomor 085745545096 dengan identitas dari ayah Adi Kurniawan	Ditindaklanjuti melalui surat kepada Dirut Indosat Ooredoo Nomor 470/1726/114.2/2018	9 April 2018

				tidak semua provider bisa di cek.			
10.	11 Mei 2018	Andhika Kurnia Nanda	Mahasiswa	Jumlah billboard/papan reklame di Surabaya	Untuk bahan dalam menyusun skripsi	Ditindaklanjuti melalui surat Nomor 065/2200/114.2/2018 dianjurkan melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai peraturan	14 Mei 2018
11.	8 Juli 2018	Ulva Novita Sari	Mahasiswa	Realisasi Penerimaan Pajak Reklame seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Periode 2012-2016	Untuk bahan dalam menyusun skripsi	Ditindaklanjuti melalui surat Nomor 065/3813/114.2/2018 dianjurkan melengkapi persyaratan permohonan informasi sesuai peraturan.	24 Juli 2018
12.	23 Agustus 2018	Badan Pekerja Malang <i>Corruption Watch</i> (MCW)	LSM	Dokumen Daftar Perizinan Pertambangan di Jawa Timur : Jenis Pertambangan, Lokasi (Kecamatan, Desa, Dusun), Tahun berlakunya izin, Pemegang izin dan Nomor izin.	Dipergunakan sebagai media kajian internal Malang <i>Corruption Watch</i> (MCW) dan media edukasi kepada masyarakat.	Ditindaklanjuti melalui surat Nomor 065/5847/114.2/2018	30 Agustus 2018
13.	1 November 2018	Jawapes <i>Corruption Watch</i> (JCW)	LSM	Permohonan informasi terkait Gambar Bestek, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantity (BOQ) Proyek Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.	Untuk diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Presiden Republik Indonesia.	Ditindaklanjuti melalui surat Nomor 065/6028/114.2/2018	9 November 2018
14.	13 Desember 2018	Jaringan Kawal Jawa Timur (JAKA JATIM)	LSM	Permohonan Informasi terkait : 1. SKPD/OPD mana saja yang mengelola Dana Hibah Tahun Anggaran 2018 dan 2019? 2. Berapa Anggaran Dana Hibah yang	Untuk mendorong Pemprov Jatim untuk terbuka dan transparan terhadap publik dan masyarakat Jatim dalam mengelola Dana Hibah.	Ditindaklanjuti melalui surat Nomor 065/6722/114.2/2018	27 Desember 2018

				<p>dilaksanakan/dikelola oleh masing-masing Kepala SKPD/OPD yang ditunjuk sebagai Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Jawa Timur TA 2018 dan 2019.</p> <p>3. Salinan data penerima (nama-nama pengurus) Dana Hibah TA 2018 yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat/badan/lembaga/organisasi masyarakat/kelompok masyarakat atau istilah lainnya (by name by address and nominal) atau diumumkan ke publik melalui media cetak/online atau melalui website PPID Jawa Timur dan website masing-masing OPD pelaksana/pengelola Dana Hibah TA 2018 dan 2019.</p>			
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--